

## NEGOSIASI PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

**Sonia Agusti Parbo**

Progam Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Gajah Mada

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

\*Corresponding Author Email: [sonia.agusti.parbo@mail.ugm.ac.id](mailto:sonia.agusti.parbo@mail.ugm.ac.id)

### ABSTRACT

**Purpose** : *This study is analyzed the negotiation process trade war of the United States versus China under US foreign policy.*

**Design/Methodology/ Approach** : *This research is qualitative research, because it seeks to explain negotiate trade war between US and China. This research uses the research library for data collection through book, journal, and search engines and used analytical descriptive.*

**Findings** : *the result of this study found that the trade war between US and China had a large impact on the global economy. Besides that, the trade war negotiation process aims to find a way out of the trade war. Negotiations between two countries reached a phase I agreement establish a "pause" of trade war.*

**Keywords** : *Trade War, Negotiations, United States, Political Economy Policy*

**JEL Classification** : *F50, F51, H56*

*Submission date: 28 Mei 2020*

*Accepted date: 12 Februari 2021*

### PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, terciptanya interaksi antar negara yang meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, di mana untuk meningkatkan interaksi antar negara baik secara bilateral maupun multilateral, setiap negara menjalin kerjasama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pasca Perang Dingin, menunjukkan terjadinya perubahan pola interaksi antar negara yang menunjukkan terjadinya pola pergeseran paradigma dari paradigma ideologi ke paradigma ekonomi yang mengindikasikan bahwa konflik ideologi tidak lagi relevan dalam politik internasional. Fenomena sentral yang muncul berkaitan dengan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan meningkatnya interdependensi global antar negara dan regionalisme. Meningkatnya hubungan ekonomi antar negara menyebabkan terbentuknya perdagangan internasional yang dijadikan sebagai aspek utama dalam perekonomian negara (Yuniarti, 2013).

Dewasa ini, sebagian besar negara-negara di dunia menerapkan sistem ekonomi terbuka atau perdagangan bebas, di mana sistem ini memberikan pengaruh terhadap kerjasama ekonomi dan menjadi sumber konflik antar negara. Pendekatan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dengan pendekatan politik yang dilihat dari interaksi pasar dan negara yang mana di satu sisi, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan di lain pihak ekonomi cenderung membentuk hubungan kekuasaan antar aktor. Dalam tatanan

internasional, negara maupun pasar sebagai aspek penting dalam interaksi ekonomi politik internasional. Oleh karenanya, pendekatan ekonomi menunjukkan dominasinya atas pendekatan politik yang menjadikannya sebagai prioritas utama dalam sistem global.

Tercatat sebagai negara yang menjalin kerjasama dalam skala global, Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai salah satu negara adidaya yang paling berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia dan mengutamakan perekonomian sebagai salah satu instrumen penting untuk mencapai kepentingan negara. Berdasarkan pada sistem internasional menjadikan AS sebagai salah satu negara *superpower*. Salah satu negara yang menjalin kerjasama dalam sektor perdagangan terbesar dengan AS adalah Tiongkok. Pada tahun 2001, bergabungnya Tiongkok menjadi salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO) memiliki tujuan untuk membuka jalur perdagangan yang seluas-luasnya dengan meningkatkan nilai investasi asing ke berbagai negara di dunia dan untuk memperkuat perekonomian Tiongkok (Wishanti, 2016).

Akan tetapi, pasca terjadi krisis ekonomi global tahun 2008, AS mengalami perlambatan ekonomi dan menjadi Tiongkok sebagai raksasa ekonomi baru di dunia. Hal tersebut menjadikan momentum bagi Tiongkok untuk memainkan peran penting dalam stabilitas perdagangan dan keuangan dunia. Dinamika baru dalam hubungan ekonomi Tiongkok saat ini mampu menyaingi kekuatan perekonomian AS. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi tantangan tersendiri terhadap kerjasama ekonomi yang dibangun antara AS dan Tiongkok yang mana terjadinya peningkatan kegiatan ekspor impor Tiongkok di AS maupun di negara lainnya (Wishanti, 2016).

Perekonomian Tiongkok berkembang pesat yang menjadikannya sebagai salah satu ancaman terhadap stabilitas perekonomian AS dalam skala global. Secara historis, hadirnya rivalitas negara adidaya ini cenderung menyebabkan destabilisasi geopolitik yang berkembang dalam berbagai aspek termasuk ekonomi. Peningkatan ekonomi dan keamanan Tiongkok mengakibatkan terjadinya gejala geoekonomi terutama dalam perdagangan dan kerjasama AS dan Tiongkok.

Kondisi perdagangan negara yang kuat dapat dilihat berdasarkan neraca perdagangan negara tersebut yang menunjukkan lemah atau kuatnya daya saing antar negara. Turunnya neraca perdagangan suatu negara ditandai dengan terjadinya defisit pada jumlah ekspor suatu negara dibandingkan pada jumlah impor yang masuk. Terlihat bahwa kegiatan perdagangan antara AS dan Tiongkok menunjukkan tren perubahan total ekspor Tiongkok ke AS jauh lebih besar daripada ekspor AS ke Tiongkok (Office of the US Trade Representative, 2020).

Dalam bidang ekonomi, posisi AS dan Tiongkok sebagai negara adidaya memiliki kekuatan ekonomi sama. Akan tetapi, selama satu dekade terakhir, perekonomian AS menunjukkan angka defisit tertinggi yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan terhadap hubungan perekonomian global. Pada masa pemerintahan Donald Trump, AS mengalami berbagai gejala dan tantangan terhadap politik domestik maupun hubungan internasionalnya. Fenomena yang menjadi isu sentral pada era Trump adalah ekonomi dan perdagangan internasional dengan menetapkan kebijakan ekonomi yang proteksionisme. Salah satu upaya yang dilakukan Trump dalam menurunkan defisit

neraca perdagangan negaranya adalah memberlakukan tarif terhadap barang yang masuk ke negaranya terutama dari Tiongkok. Kebijakan tarif yang diterapkan mendapatkan kecaman dari Tiongkok yang mengakibatkan terjadinya perang dagang antar kedua negara tersebut (Morrison, 2019).

Pada era kepemimpinan Trump, AS cenderung menerapkan *economic statecraft* yang merupakan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional sehingga memperoleh hasil geopolitik maupun geoekonomi yang menguntungkan negaranya. Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa *Free Trade Area* (FTA) tidak mampu memberikan perubahan terhadap kepentingan nasional AS terutama dalam bidang ekonomi, sehingga Trump merubah kebijakan politik luar negerinya menjadi unilateralisme yang mengedepankan pemberlakuan tarif terhadap geoekonomi unilateral untuk mengembalikan posisi hegemoni AS (Venisa, 2019).

Perang dagang AS dan Tiongkok yang diawali sejak kampanye Trump yang menyatakan bahwa akan menerapkan kebijakan proteksi terhadap ekonomi AS yang berlandaskan pemberlakuan tarif barang masuk maupun keluar. Lebih lanjut, kebijakan perdagangan internasional dapat berupa kebijakan dalam bidang ekspor dan impor, di mana pemerintah Trump memberlakukan kebijakan tarif terhadap Tiongkok sebagai salah satu Langkah untuk membendung produk Tiongkok berkembang di AS dan bertujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan negara (Damayanti et al., 2018).

Selain itu, perang dagang antar AS dan Tiongkok bereskalasi pada 8 Maret 2018 yang mana Trump menetapkan tarif sebesar US\$34 miliar barang impor dari Tiongkok. Barang-barang televisi dan peralatan medis yang berasal dari Tiongkok dikenakan pajak impor sebesar 25%. Akan tetapi, Tiongkok juga menetapkan kebijakan memberlakukan tarif sendiri terhadap lebih dari 500 produk AS senilai US\$34 miliar seperti produk daging sapi, susu, makanan laut, dan kacang kedelai (Damayanti et al., 2018).

Perang tarif dari kedua negara tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan terus berlanjut yang berpengaruh terhadap negara-negara berkembang lainnya. Disamping itu, Trump terus menekan pemerintah Tiongkok untuk melakukan perubahan terhadap beberapa kebijakan dagang yang ditetapkan. Akan tetapi, Tiongkok menganggap tidak ada yang salah dari praktik kebijakan perdagangan yang diterapkan negaranya. Kebijakan penerapan dan kenaikan tarif yang saling berbalas oleh kedua negara tersebut dijadikan sebagai instrumen pertahanan negara masing-masing dalam menjaga stabilitas perekonomiannya. Setelah mengalami gejala hubungan perang dagang yang semakin kompleks, kedua negara sepakat untuk duduk bersama melakukan negosiasi terhadap kebijakan perdagangan ekonomi negara.

Dalam perkembangan sistem ekonomi politik internasional, negara dan pasar dijadikan sebagai aspek utama dalam hubungan geoekonomi global. Artinya, aktivitas negara berjalan berdasarkan pada pola sistem pasar yang diperluas secara geografis dan kerjasama antar negara dibangun berdasarkan mekanisme harga. Disamping itu, perdagangan global tidak terlepas dari ambisi negara untuk menjadi kaya dan kuat. Hal ini berhubungan dengan perspektif merkantilisme yang melihat perdagangan global

sebagai sumber pemasukan dan kekayaan suatu negara dengan cara menyebarluaskan hasil produknya ke luar negeri (Badiri, 2020).

Lebih lanjut, dalam menganalisa negosiasi perang dagang AS dan Tiongkok, penulis menggunakan perspektif merkantilisme yang meliputi proteksionisme dan hambatan perdagangan, kemudian menggunakan konsep negosiasi dalam melihat dinamika penyelesaian konflik tersebut. Perspektif merkantilisme cenderung menjelaskan sisi ekonomi negara, di mana negara sebagai aspek utama dalam mengatur jalannya ekonomi. Merkantilisme memandang setiap negara cenderung bersifat egois yang disebabkan oleh adanya tendensi bagi setiap negara untuk mencapai keuntungan secara maksimal dan membuat pihak lain mendapatkan kerugian. Singkatnya, hubungan perdagangan antar negara bersifat *zero-sum game* yang berarti pada situasi perdagangan akan ada yang menang dan kalah dan merkantilisme tidak menganut sistem *win-win cooperation* (Putri, 2019).

Landreth dan Collander menyatakan bahwa merkantilisme melihat tujuan dari kegiatan ekonomi adalah produksi yang mendorong terjadinya peningkatan ekspor dan menekan konsumsi domestik. Merkantilisme menetapkan regulasi ekonomi negara untuk mencapai kekuatan negara dalam persaingan dengan negara lain yang mana negara menetapkan kebijakan yang akan meningkatkan *power* dan kekayaan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Montaigne yang menyatakan bahwa negara tidak akan mendapatkan keuntungan tanpa ada peran dari negara lain yang dirugikan (Abidin, 2020).

Lebih lanjut, terdapat dua jenis pesaiangan ekonomi antar negara yaitu pertama, *defensive benign mercantilism* yang mana negara cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi nasionalnya karena hal tersebut memiliki aspek penting dalam perumusan keamanan. Kedua, *aggressive malevolent mercantilism* yang mana negara-negara berusaha untuk mengeksploitasi perekonomian internasional. Hal ini dapat dilihat bahwa perang dagang AS dan Tiongkok cenderung mengarah pada *aggressive malevolent merchantilism* yang mana AS menetapkan kebijakan proteksionisme yang mengeksploitasi semua barang Tiongkok yang hendak masuk ke AS (Putri, 2019).

Munculnya proteksionisme sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan negara yang berfokus terhadap ekonomi secara internasional dengan mengeluarkan kebijakan seperti pajak, tarif masuk, bea cukai, serta pembatasan kuota. Proteksionisme melahirkan beberapa kebijakan yang selalu mendapat kecaman dari negara lainnya seperti pada era Trump yang menerapkan kebijakan hambatan tarif dan kuota sebagai upaya pemerintah untuk membendung produk luar negeri serta memberikan peluang bagi AS dalam bersaing dengan produk luar negeri. Oleh karenanya, kebijakan perang dagang dijadikan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Merkantilisme melihat bahwa untuk mencapai kesejahteraan negara melalui tingginya tingkat ekspor negara, hubungan perdagangan sangat penting bagi negara untuk menjaga perekonomiannya. Adam Smith menyatakan bahwa asumsi dasar merkantilisme adalah pencapaian keseimbangan dagang yang menghasilkan keuntungan. Singkatnya, kebijakan ekonomi suatu negara bertujuan untuk memperkuat ketahanan negara terhadap persaingan ekonomi dengan negara lain (Magnusson, 2004).

Montaigne memperkuat pernyataannya bahwa negara tidak akan memperoleh keuntungan tanpa ada negara lain yang dirugikan. Merkantilisme menganggap ketergantungan dari negara lain sangat merugikan, sehingga banyak negara-negara di dunia membentuk kebijakan yang dapat merugikan negara lain seperti AS yang menerapkan kebijakan tarif maupun non-tarif, pembatasan kuota, proteksi perdagangan, serta ekspor-impor terhadap produk-produk Tiongkok. Terlihat jelas bahwa Trump mencoba menerapkan konsep tersebut dalam sistem perekonomian negaranya (Herlitz, 2011).

Lebih lanjut, Morgenthau menjelaskan bahwa untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, keadaan dunia dipenuhi dengan kompetisi untuk memperoleh kekuasaan, sehingga negara akan melakukan apapun untuk menjaga stabilitas negaranya. Oleh karenanya, tindakan perang dagang antara AS dan Tiongkok yang memperlihatkan bahwa kedua negara tersebut menjalin kerjasama, tetapi kerjasama yang dijalin dipenuhi dengan kompetisi yang menyebabkan kedua negara tersebut melakukan berbagai tindakan untuk memperoleh kekuasaan terutama dalam menguasai perekonomian global (Noermanita, 2017).

Konflik yang terjadi antar kedua negara tersebut menimbulkan berbagai respon dari negara lain. Banyak negara-negara di dunia mengecam kebijakan yang diterapkan Trump, karena hal tersebut tidak hanya merugikan Tiongkok, melainkan juga negara-negara lainnya khususnya negara berkembang yang bergantung pada produk dari AS dan Tiongkok. Oleh karenanya, dilakukannya negosiasi untuk menemukan jalan keluar dari konflik yang dialami, mengingat banyak negara yang dirugikan.

Negosiasi merupakan proses interaksi sosial yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dan diharapkan untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan keuntungan bersama melalui jalur perundingan yang bersifat berkelanjutan (Lumumba, 2013). Secara teoritik, terdapat empat pendekatan negosiasi yaitu pendekatan distributif (*win-lose approach*), pendekatan kalah-kalah (*lose-lose approach*), pendekatan kompromi (*compromise approach*), dan pendekatan integratif (*win-win approach*). Proses negosiasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi setiap pihak harus mengetahui informasi dengan baik mengenai pihak lawannya. Dilihat dari perundingan yang dilakukan AS dan Tiongkok, kedua negara melakukan pertemuan secara langsung untuk menemukan jalan keluar dan memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*), di mana prinsip negosiasi yang bersifat *negotiable* atau sukarela dalam mencapai kepentingan bersama (Siswanto, 2017).

Kebangkitan Tiongkok dalam bidang ekonomi telah menghebohkan dunia, terutama bagi AS yang menyebabkan terjadinya eskalasi konflik perang dagang kedua negara. Akan tetapi, perang dagang dianggap tidak melanggar ketentuan hukum perdagangan internasional karena merupakan konflik ekonomi antar negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip WTO yang mana terdapatnya prinsip resiprositas atau timbal balik antar sesama anggota WTO (Anggraeni, 2019). Selain itu, meningkatnya perdagangan internasional dan pasar bebas disebabkan oleh adanya arus globalisasi yang semakin berkembang pesat, fenomena globalisasi tidak bisa dihindari dari munculnya sistem pasar

yang bebas dan terbuka. (Mayasari, 2019) menjelaskan bahwa globalisasi perdagangan menyebabkan terjadinya pasar bebas dan mengakibatkan ekonomi perdagangan suatu negara dapat secara langsung terdistribusikan ke negara lain yang bertujuan untuk memperluas akses pasar dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, AS dibawah era Trump melihat adanya pasar bebas atau globalisasi sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan beresiko terhadap perekonomian negara karena dapat menyebabkan krisis bagi negaranya. Hal tersebut mengakibatkan merubah pandangan AS dari awalnya optimis terhadap hadirnya globalisasi menjadi pesimis. Pasar bebas juga menyebabkan produk-produk AS kalah saing dengan produk Tiongkok karena harga dari produk Tiongkok relatif lebih murah daripada produk AS. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan dari berkembang bebasnya produk Tiongkok di AS telah menyentuh secara keseluruhan diberbagai sektor terutama ekonomi AS. Oleh karenanya, Trump menerapkan kebijakan untuk mengatasi dampak negatif dari sistem pasar bebas yang dikembangkan Tiongkok serta memanfaatkan dengan baik pengaruh dari globalisasi (Mayasari, 2019).

Dalam berbagai literatur ekonomi telah banyak diungkapkan bahwa perdagangan bebas dunia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terdapatnya berbagai perubahan dalam kebijakan perdagangan suatu negara yang mengikuti tuntutan dari pasar atau arus perdagangan internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi produk-produk domestik dari pesaingan produk global seperti halnya yang dilakukan AS memberlakukan sistem ekonomi proteksionisme yang dijadikan sebagai strategi pemerintah untuk melindungi keberlangsungan ekonominya dan produk dalam negeri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana Dawson menyatakan bahwa penelitian kualitatif mengeksplorasi sikap, perilaku dan pengalaman yang dilakukan melalui wawancara atau fokus kelompok yang bertujuan untuk mencoba menekankan pada penjelasan mendalam. James Mahoney dan Gary Goertz menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengobservasi kasus dan memperhatikan proses sebab-akibatnya. Proses sebab-akibat didapatkan melalui *within-case analysis* (Dawson, 2007).

Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan banyak digunakan dalam ilmu sosial yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan negosiasi perang dagang AS dan Tiongkok. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk melihat dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dalam menganalisa fenomena terhadap suatu penelitian sehingga dapat dipercaya lebih eksplanatif dan mampu memberikan penjelasan yang lebih detail terkait dengan apa yang akan diteliti. Metode kualitatif ini tepat digunakan untuk menganalisa isu yang membutuhkan pemahaman lebih subjektif dan mendalam. Dalam hubungan internasional, metode ini banyak digunakan karena isu-isu HI cenderung bersifat historis dan membutuhkan eksplanasi yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini didapatkan melalui buku, website resmi, dan jurnal. Sedangkan, data sekunder didapatkan melalui pemberitaan dari media elektronik dan cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data-data yang didapatkan dari berbagai literatur tersebut, akan digunakan sebagai bahan dalam menganalisa fenomena yang diangkat dalam penelitian.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Ekonomi Politik Amerika Serikat masa Donal Trump**

Amerika Serikat merupakan negara yang dipandang dunia sebagai negara yang besar dan kuat yang memiliki kelebihan dan kekuatan dari segala aspek serta mempunyai perekonomian yang dinamis dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Dalam masa pemerintahan Trump menunjukkan arah kebijakan politik luar negeri sebagai bentuk anti-hegemoni dan anti-multilateralisme yang telah dibentuk sebelumnya. Trump menilai bahwa hegemoni AS tidak mampu memberikan manfaat bagi AS, di mana hegemoni tersebut telah membatasi pergerakan dan kemampuan AS untuk menjadi negara yang dominan dan otonom (Yuliantoro et al., 2016).

Pada awal tahun 2016 merupakan masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump sebagai salah satu kandidat yang mencetuskan slogan kampanye "*Make American Great Again*" yang bertujuan untuk menjadi negara terbaik dan nomor satu di dunia. Sesuai dengan slogan kampanyenya, Trump mengaplikasikan kebijakan luar negerinya dengan slogan "*American First*" untuk menjadikan AS sebagai negara nomor satu di dunia. Disamping itu, doktrin *Make American Great Again* dan *American First* mengarah pada semangat ultrasionalistik yang kontras dengan ide internasionalisme yang menjadi kepentingan luar negeri AS. Disisi lain, konsekuensi dari kebijakan luar negeri dengan doktrin *American First* untuk mencegah adanya intervensi dari dunia internasional terhadap urusan dalam negerinya dan berusaha mengurangi komitmen AS di tingkat internasional dan berfokus dalam mencapai kepentingan nasionalnya (Wardhana & Dugis, 2019).

Kebijakan perdagangan Trump yang dituangkan dalam agenda kebijakan perdagangan tahun 2018 dan 2019 lebih agresif daripada kebijakan para presiden AS lainnya. Pada masa pemerintahan Donald Trump menerapkan kebijakan ekonomi yang proteksionisme. Trump telah berkomitmen sejak awal kampanyenya untuk memberikan keuntungan yang banyak bagi Amerika Serikat. Dalam melakukan perdagangan, Trump melakukan renegotiasi terhadap perjanjian perdagangan internasionalnya. Pemerintahan AS berfokus pada kerjasama bilateral antar dua negara dibandingkan kerjasama multilateral. Hal tersebut dilakukan Trump untuk mengurangi defisit perdagangan AS.

Pemerintah Trump memprioritaskan penerapan hukum perdagangan nasional dan tidak mentolerir praktik perdagangan yang tidak adil yang dapat merugikan negara. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, pada *Section 301* menjelaskan bahwa Presiden dapat mengambil tindakan pembalasan termasuk mengenakan tarif kuota jika suatu negara menolak hak Amerika Serikat yang berdasarkan pada perjanjian perdagangan bebas atau diskriminatif. Instrumen lainnya tertuang dalam

*Section 232* dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1962 tentang implikasi keamanan impor nasional. Selain itu, pemerintah Trump juga telah menerapkan lebih banyak tindakan antidumping dan penyeimbangannya kekuatan ekonomi negara dari pada pemimpin sebelumnya (Batubara, 2019).

Beberapa hal yang dilakukan Trump dalam menerapkan proteksionisme ekonominya seperti keluarnya Amerika Serikat dari *Trans Pacific Partnership* (TPP) tahun 2017 yang merupakan perjanjian multilateral beranggotakan 12 negara dalam bidang perdagangan. Trump berpendapat masuknya buruh dari negara berkembang menjadi salah satu ancaman bagi negaranya. Selain itu, Trump juga akan membangun tembok perbatasan dengan Meksiko di mana dilihat dari aspek ekonomi, banyaknya imigran dari negara lain masuk ke Amerika yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan hal ini menjadi salah satu ancaman bagi penduduk Amerika harus bersaing dengan negara lainnya dalam mendapatkan pekerjaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian warga Amerika Serikat (Yuliantoro et al., 2016).

Kebijakan terakhir yang diterapkan Trump adalah menaikkan tarif impor dari produk Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok dalam bidang perekonomian telah menggetarkan dunia termasuk Amerika Serikat. Trump melihat ini sebagai ancaman nyata bagi stabilitas perekonomian negaranya. Defisit neraca perdagangan yang di alami oleh AS memicu munculnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok di mana perang dagang tersebut dianggap sebagai kebangkitan Tiongkok dalam perekonomian dunia (Williams, 2020).

### **Perang Dagang dan Negosiasi Amerika Serikat dan Tiongkok**

Meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dalam tatanan global telah menentukan pola interaksi dalam politik internasional, baik kerjasama maupun konflik. Munculnya konflik tidak hanya berdasarkan pada persaingan memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang penting melainkan juga konflik yang terjadi akibat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi global. Dalam perkembangannya, konflik ekonomi akan berdampak pada tatanan politik suatu negara (Yuniarti, 2013).

Perang dagang antara AS dan Tiongkok tidak terjadi begitu saja. Fenomena tersebut diawali sejak terpilihnya Trump menjadi Presiden AS tahun 2016. Terpilihnya Trump menciptakan situasi dan kondisi panas terhadap perekonomian global. Perang dagang menimbulkan berbagai asumsi negatif terhadap gejolak perekonomian negara-negara di dunia. Dalam praktik kebijakan ekonomi, Amerika Serikat dibawah pemerintahan Trump menerapkan prinsip dengan mengubah tata perdagangan internasional yang semulanya bersifat perdagangan bebas kemudian menjadi perdagangan yang dilakukan hanya antar negara. Berbeda dengan Tiongkok dibawah pemerintahan Xi Jinping yang mendukung penuh atas perdagangan bebas dunia dan membantah bahwa globalisasi yang menyebabkan terjadinya banyak konflik di dunia (BBC, 2017).

Bertolak belakang dari kedua pemimpin negara tersebut telah menimbulkan berbagai polemik. Berdasarkan pada laporan dari *PDB Annual Growth Rate 2018* (Damayanti et al., 2018), menjabarkan bahwa ekonomi Tiongkok cenderung lebih stabil daripada AS. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata GDP Tiongkok mencapai 6,75% dibandingkan

AS hanya mencapai 4,2% per Juli 2018. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran AS dan menjadi sejarah baru dalam tatanan ekonomi global (Damayanti et al., 2018).

Dalam menghadapi Tiongkok, Trump berusaha membentuk strategi ekonomi melalui kebijakan dengan menaikkan tarif terhadap barang dari Tiongkok. Pada tanggal 17 Januari 2018, Trump mengancam Tiongkok karena dianggap telah mencuri Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selain itu, pada 22 Januari 2018, Trump juga memberlakukan tarif terhadap seluruh negara di dunia terkecuali Kanada untuk produk panel surya sebesar 30% mesin cuci impor sebesar 20%. Selain itu, AS juga menetapkan tarif sebesar 25% terhadap 1.300 produk teknologi, transportasi, dan medis. Akan tetapi, Tiongkok langsung merespon atas kebijakan yang diterapkan Trump dengan mengancam biaya US\$1.1 miliar terhadap impor produk sorgum asal AS pada 4 Februari 2018 (Badiri, 2020).

Perang dagang kedua negara juga dipicu oleh kenaikan tarif pajak sebesar 25% dan 10% untuk aluminium pada 8 Maret 2018. Akan tetapi, Tiongkok langsung merespon atas tindakan yang diterapkan AS yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 Tiongkok menetapkan pembatasan tarif impor sebesar US\$3 miliar terhadap 128 jenis produk asal AS termasuk komoditas agrikultur, buah-buahan, kacang-kacangan, dan babi. Pada saat bersamaan, AS telah mengajukan permintaan kepada WTO untuk membentuk panel penyelesaian sengketa atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual. Lebih lanjut, pada 4 April 2018 Tiongkok juga menetapkan tarif sebesar US\$50 miliar terhadap 106 produk AS termasuk kacang kedelai, daging sapi, jagung, beberapa pesawat terbang dan berbagai kendaraan. Tidak hanya itu, Tiongkok juga menetapkan kebijakan anti-dumping tepung sejumlah US\$1 miliar yang berasal dari AS. Namun, Tiongkok juga mengajukan keluhan kepada WTO mengenai pembebanan tarif baja oleh AS (Badiri, 2020).

Sementara itu, melihat aksi saling berbalas perang tarif ini semakin memanas dan kedua negara berusaha untuk menemukan jalan keluar. Pada 21 April 2018 menjadi momentum yang baik bagi perang dagang AS dan Tiongkok, di mana *U.S Treasury Secretary* Steven Mnuchin menyatakan bahwa akan melakukan kesepakatan dagang dengan Tiongkok. Dengan demikian, Tiongkok merespon niat baik tersebut dan melakukan perundingan perdagangan bilateral di Beijing. Hal tersebut diindikasikan pada 3-7 Mei 2018 yang mana AS dan Tiongkok melakukan perundingan perdagangan pertama kali untuk membahas resolusi konflik dagang yang sedang dihadapi. Pertemuan di Beijing ini menjadi momentum pertama kedua negara menentukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Pada pertemuan ini, AS meminta Tiongkok untuk mengurangi kesenjangan perdagangan sebesar US\$200 miliar dalam waktu dua tahun. Akan tetapi, pertemuan perundingan pertama tersebut belum menemukan kesepakatan (Pujayanti, 2018).

Lebih lanjut, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan XI Jinping mengunjungi Washington untuk melakukan pembicaraan lanjutan terhadap kesepakatan dagang kedua negara pada 15 Mei 2018, di mana Tiongkok berencana melakukan penghentian tarif impor tepung asal AS. Akan tetapi, pernyataan tersebut laporan tidak benar. Hingga pada 20 Mei 2018, kedua negara sepakat untuk menunda sementara perang dagang dengan

menanggukkan kenaikan tarif setelah Tiongkok dilaporkan setuju untuk membeli lebih banyak barang dari AS (Sebayang, 2019).

Akan tetapi, Tiongkok berencana akan menurunkan tarif impor mobil hingga 15% dari 25%. Namun, Trump menilai kebijakan tersebut tidak mendatangkan keuntungan bagi negaranya, sehingga Trump menetapkan tarif 25% senilai US\$50 miliar terhadap impor Tiongkok. Oleh karenanya, munculnya babak baru perang dagang pasca dilakukannya perundingan pertama. Pada Juni 2018, AS telah melakukan kebijakan kenaikan tarif 3 kali terhadap barang dari Tiongkok. Kedua negara saling melakukan aksi berbalas dalam kenaikan tarifnya, seperti pada 15 Juni 2018, AS menetapkan biaya impor senilai US\$34 miliar terhadap 1.102 produk asal Tiongkok dan 284 produk lainnya sejumlah US\$16 miliar. Tiongkok langsung merespon atas kebijakan yang ditetapkan AS dengan melakukan pembebanan biaya senilai US\$34 miliar produk AS (Sebayang, 2019).

Sementara itu, pada 10 Juli 2018 AS mengusulkan untuk mengenakan tarif 10% senilai US\$200 miliar. Akan tetapi, pada 1 Agustus 2018 Trump meminta Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk menaikkan tarif impor barang dari Tiongkok menjadi 25%. Aksi berbalas perang tarif tidak hanya berhenti begitu saja. Tiongkok merespon kebijakan AS dengan menetapkan bea masuk 25% produk AS senilai US\$16 miliar. Kebijakan dari kedua negara tersebut diberlakukan pada 23 Agustus 2018 (BBC News Indonesia, 2018).

Amerika Serikat sebagai negara yang menginisiasi terjadinya perang dagang secara agresif dengan Tiongkok. AS tidak henti-hentinya mengumumkan kenaikan tarif terhadap impor Tiongkok. Dari data diatas terlihat bahwa AS selalu menaikkan tarif lebih tinggi dibandingkan Tiongkok dikarenakan AS merasa terancam dengan keberadaan Tiongkok yang semakin mengejar kekuatan ekonomi Amerika. Pemerintah Tiongkok mengindikasikan bahwa negara tidak akan terburu-buru untuk menyaingi angka tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat. Pembalasan yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan langkah yang rasional dilakukan oleh Tiongkok dalam menjaga kestabilan ekonominya. Selain itu, langkah pembalasan yang diambil Tiongkok tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional negaranya (Damayanti et al., 2018).

Melihat aksi saling berbalas tarif yang tidak ada ujungnya, membuat kedua negara memutuskan untuk mengadakan kembali perundingan dalam menemukan jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Bersamaan dengan pertemuan forum G20 pada 30 November 2018, AS dan Tiongkok melaksanakan perundingan lanjutan dan memberikan penekanan besar terhadap kebijakan perdagangan mereka. Perundingan kedua ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata selama 90 hari atas biaya tarif impor baru yang berlaku pada 1 Januari 2019. Tiongkok juga menetapkan akan meningkatkan pembelian terhadap produk pertanian dan energi dari AS. Oleh karenanya, pada 24 Februari 2019, Trump kembali menunda rencananya untuk menaikkan biaya tarif pada barang Tiongkok sebesar US\$200 miliar menjadi 25% dari 10% dikarenakan ditemukannya kemajuan yang substansial dalam putaran kedua perundingan perdagangan dengan Tiongkok (Sebayang, 2019).

Selanjutnya, pada 8 Mei 2019 AS dan Tiongkok kembali melakukan negosiasi di Washington DC untuk membahas keberlanjutan perang dagang. Namun, negosiasi

tersebut berakhir gagal dikarenakan pemerintah AS mengatakan bahwa Tiongkok telah mengingkari komitmennya dalam membeli produk pertanian AS. Oleh karenanya, AS kembali menetapkan tarif yang semula 10% menjadi 25%. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya babak baru perang dagang kedua pihak tahun 2019 (CNN Indonesia, 2019).

Perundingan selanjutnya diadakan pada 29 Juni 2019 pada pertemuan KTT G20 di Osaka, di mana kedua negara secara resmi menyetujui untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan setelah konsesi dari kedua pihak. Trump menyetujui untuk tidak menaikkan tarif baru dan melakukan pelonggaran pembatasan suplai bagi perusahaan telekomunikasi Tiongkok yaitu *Huawei Technologies*. Begitu pula dengan sebaliknya, Tiongkok menyetujui untuk membeli lebih banyak produk pertanian AS. Akan tetapi, praktik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan permintaan AS di mana Trump mengeluhkan bahwa Tiongkok belum menindaklanjuti perjanjian mereka untuk membeli lebih banyak produk pertanian AS (Sembiring, 2019).

Oleh karena itu, pada 1 Agustus 2019 negosiasi kedua negara terhenti dan Trump kembali menerapkan dan menaikkan tarif kepada Tiongkok sebesar 10% senilai US\$300 miliar yang akan diberlakukan 1 September 2019. Disamping itu, Trump juga menegaskan bahwa pemberlakuan tarif akan terus meningkat hingga 25%. Trump menegaskan bahwa perundingan akan tetap dilaksanakan meskipun ditetapkan tarif yang diperkenalkan secara bertahap. Ketegangan perang dagang ini mencapai titik puncak, di mana ancaman Trump tersebut menyebabkan penghentian total pembelian produk pertanian AS yang berdampak pada melemahnya dolar AS (Bariah et al., 2020).

Rangkaian penyelesaian sengketa dagang dilanjutkan pada 4 September 2019 yang mana kedua negara mengumumkan akan melaksanakan perundingan perdagangan baru pada pertengahan September 2019. Tiongkok akan membebaskan 16 jenis produk AS dari tarif selama satu tahun. Sebaliknya, Trump mengumumkan akan menunda kenaikan tarif dari tanggal 1-15 Oktober 2019. Akan tetapi, pada putaran negosiasi berikutnya Trump, Lighthizer dan Mnuchin berbicara kepada Wakil Perdana Menteri Tiongkok yaitu Liu He yang setuju untuk menetapkan langkah-langkah dalam meredakan ketegangan meskipun perang dagang kedua negara belum menemukan titik terang, tetapi para pemimpin negara berkomitmen untuk melindungi produk dari kenaikan tarif (Safitri, 2020).

Akhirnya, kedua negara setuju untuk melakukan perundingan kembali dan mengumumkan kesepakatan *Fase I* yang dilakukan selama dua hari pada 10-11 Oktober 2019 di Washington DC yang menghasilkan perjanjian bahwa Tiongkok akan membeli produk pertanian AS senilai US\$40-50 miliar setiap tahunnya dan memperkuat ketentuan tentang kekayaan intelektual. Sebaliknya, AS menunda kenaikan tarif impor Tiongkok yang dijadwalkan pada 15 Oktober (Costa & Sukartha, 2020).

Pada November 2019 dilakukannya pertemuan para pemimpin global di Santiago, Chili untuk menandatangani kesepakatan perjanjian tahap I dan menjadi kesepakatan akhir. AS setuju untuk tidak melanjutkan ketentuan tarif 15% senilai US\$160 miliar dan menetapkan tarif 7,5% terhadap produk impor Tiongkok, tetapi tarif 25% pada impor

Tiongkok sejumlah US\$250 miliar tetap dipertahankan dengan kemajuan lebih lanjut akan dihubungkan dalam negosiasi perdagangan masa depan (Costa & Sukartha, 2020).

Setelah berlangsung hampir dua tahun perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia, pada 15 Januari 2020 telah dicapai kesepakatan Tahap I untuk menetapkan “masa jeda” perang dagang antar kedua negara. Penandatanganan tersebut dilakukan di Washington DC yang ditanda tangani oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dihadiri oleh para donor terutama partai Republik dan pemimpin bisnis, di mana Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan menyediakan panggung yang lebih kuat untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok (BBC News Indonesia, 2020).

Adapun isi dari kesepakatan tersebut antara lain Tiongkok berkomitmen akan meningkatkan impor produk AS sebesar US\$200 miliar di atas level tahun 2017, meningkatkan pembelian produk pertanian sebesar US\$32 miliar, manufaktur sebesar US\$78 miliar, energi sebesar US\$52 miliar, dan jasa sebesar US\$38 miliar. Selain itu, Tiongkok sepakat untuk bertindak lebih tegas terhadap pemalsuan dan memudahkan perusahaan untuk menempuh tindakan hukum atas pencurian rahasia dagang. Disamping itu, AS akan mempertahankan tarif hingga 25 persen bagi produk Tiongkok yang berkisar US\$360 miliar dan Tiongkok telah mengenakan tarif baru atas produk AS sebesar US\$100 miliar. Trump menegaskan perjanjian tersebut merupakan perjanjian Tahap I dan akan melakukan kembali perundingan Tahap II untuk membahas mengenai kekayaan intelektual Amerika Serikat (Pramadiba, 2020).

Perang dagang kedua negara akan terus berlanjut mengingat terdapat banyak kepentingan dibalik sengketa tersebut. Pertimbangan untung rugi menjadi instrumen penting terjadinya perang dagang tersebut dan karenanya tidak pernah ada yang diuntungkan dari perang dagang mengingat pihak lawannya akan melakukan hal yang sama terhadap produk dari pihak lainnya. Hal tersebut menegaskan bahwa sejatinya perang dagang merugikan kedua pihak maupun negara yang tidak terlibat juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, sejarah perang dagang selalu berakhir dengan perundingan atau negosiasi yang sekiranya akan memberikan *win-win solution* untuk semua pihak yang terlibat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa hubungan bilateral antar dua negara berdaulat tidak selalu berjalan dengan lancar, di mana kerjasama tersebut dapat menimbulkan berbagai gejala yang merugikan negara itu sendiri. Hal tersebut biasanya terjadi disebabkan oleh adanya perubahan rezim di salah satu negara, sengketa wilayah, pergeseran orientasi politik luar negeri maupun perubahan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri suatu pemimpin negara. Perubahan kebijakan politik luar negeri ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional atau kerjasama internasional yang merugikan negara itu sendiri.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika dan Tiongkok telah menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang merugikan kedua belah pihak. Kebijakan perang dagang yang digagas AS sebagai langkah proteksi dan didasarkan pada faktor kepentingan Trump yang ingin menerapkan proteksionisme pada masa pemerintahannya dan menstabilkan neraca perdagangan bilateral dengan Tiongkok yang telah mengalami defisit. Fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi memberi imbasan terhadap pencapaian kesepakatan tahap pertama dalam mengatasi konflik perang dagang tersebut. Ditandatangani nya kesepakatan tersebut menjadi titik awal bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama ekonomi yang lebih baik lagi kedepannya meskipun kesepakatan tersebut tidak menjamin terhenting perang tarif dari kedua pihak.

### **Saran**

Dari hasil penelitian diatas, perang dagang berpengaruh terhadap perekonomian global, negosiasi yang dilakukan kedua negara tersebut ada baiknya jika diputuskan secara bersama dengan menemukan hasil yang tidak merugikan banyak pihak termasuk negara lain yang menjadi imbas dari perang dagang tersebut. Dalam penelitian ini hanya melihat tentang perundingan perang dagang Tahap I, oleh karenanya peneliti selanjutnya berfokus terhadap perundingan Tahap II serta melihat respon dunia internasional dan membandingkan hasil dari negosiasi Tahap I dan negosiasi Tahap II.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z. (2020). Upaya Indonesia Meningkatkan Ekspor Furnitur ke Amerika Serikat di Tengah Perang Dagang Amerika Serikat-China. *JOM FISIP*, 7(2), 1–17.
- Anggraeni, N. (2019). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Al-Ahkam*, 15(1), 1–7.
- Badiri, I. (2020). Analisis Ekonomi Politik Internasional Dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat–Tiongkok Periode 2018-2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 147–157.
- Bariah, I., Anam, N., Mubarak, A. G., & Rohman, S. F. (2020). Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China. *Jurnal Humaniora*, 4(2), 155–167.
- Batubara, E. (2019). Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina. *JOM FISIP*, 6(1), 1–13.
- BBC News Indonesia. (2018). Perang dagang dan cukai baru AS: Cina “siapkan pertempuran panjang.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45623187>
- BBC News Indonesia. (2020). AS dan China teken kesepakatan untuk redakan perang dagang . *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51130615>
- CNN Indonesia. (2019). Trump Tak Batasi Waktu Negosiasi Perang Dagang dengan China. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190613114203-532-402931/trump-tak-batasi-waktu-negosiasi-perang-dagang-dengan-china>
- Costa, G. F. Da, & Sukartha, I. M. (2020). Perbandingan Reaksi Pasar di AS, China dan Indonesia terhadap Perundingan Perang Dagang AS-China. *E-Jurnal Akuntansi*,

30(9), 2270-2280.

- Damayanti, F., Indira, N., Wahyuni, R. S., Prayoga, M. R., & Kevin N.W, G. (2018). ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang. *Indonesian Perspective*, 3(2), 145–158.
- Dawson, C. (2007). *A Practical Guide to Research Methods a user-friendly manual for mastering research techniques and projects* (Third Edit). Oxford: How To Books.
- Herlitz, L. (2011). The concept of mercantilism. *Scandinavian Economic History Review*, 7(2), 101–120.
- Lumumba, P. (2013). *Negosiasi dalam Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Graha Ilmu.
- Magnusson, L. (2004). *Mercantilism . An Interpretation*. Routledge.
- Mayasari, M. D. (2019). Transformasi Pandangan Perdagangan Internasional Amerika Serikat di Era Globalisasi. *Dauliyah*, 4(2), 29–49.
- Morrison, W. M. (2019). *China's Economic Rise : History , Trends , Challenges , and Implications for the United States*.
- Noermanita, E. (2017). Analisis Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Kerjasama Turki dan Eropa Mengenai Pengungsi Suriah. *Global & Policy*, 5(1), 48–58.
- Office of the US Trade Representative. (2020). *China, Mongolia & Taiwan*. Executive Office of the President. <https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan>
- Pramadiba, I. M. (2020). Trump Enggan Melakukan Renegosiasi Kesepakatan Dagang Dengan Cina. *Tempo*. <https://dunia.tempo.co/read/1341530/trump-enggan-melakukan-renegosiasi-kesepakatan-dagang-dengan-cina/full&view=ok>
- Pujayanti, A. (2018). Perang Dagang Amerika Serikat-China dan Implikasinya bagi Indonesia. *Info Singkat: Bidang Hubungan Internasional*, 10(7), 7–12.
- Putri, S. Y. (2019). Kepentingan Indonesia Memberlakukan Pengenaan Bea Masuk yang Tinggi untuk Produk Minuman Beralkohol (MINOL) di ASEAN Free Trade Area (AFTA) Tahun 2015-2018. *JOM FISIP*, 6(2), 1–15.
- Safitri, K. (2020). Perang Dagang, Ini Isi Kesepakatan AS-China Fase I. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2020/01/14/130900026/perang-dagang-ini-isi-kesepakatan-as-china-fase-i>
- Sebayang, R. (2019). Trump Mengancam Lagi, Begini Kronologi Perang Dagang AS-China. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190507141536-4-70991/trump-mengancam-lagi-begini-kronologi-perang-dagang-as-china>
- Sembiring, M. J. (2019). Perang Dagang Amerika-China dan Posisi Indonesia. *Detiknews*. <https://news.detik.com/opini/d-4804274/perang-dagang-amerika---china-dan-posisi-indonesia>
- Siswanto, A. (2017). Pendekatan Dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Kuba. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 51–64. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p51-64>
- Venisa, Y. (2019). Polemik Kebijakan Luar Negeri Trump yang “Realis” . *Geotimes*. <https://geotimes.co.id/opini/polemik-kebijakan-luar-negeri-trump-yang-realis/>
- Wardhana, A., & Dugis, V. M. A. (2019). Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump. *Global Strategis*, 13(2),

141–156.

Williams, B. R. (2020). *U.S Trade Policy: Background and Current Issues*.

Wishanti, D. A. P. E. (2016). *Kebangkitan China dalam Kerjasama Ekonomi Internasional di Kawasan Asia Timur* (pp. 1–21).

Yuliantoro, N. R., Prabandari, A., & Agussalim, D. (2016). Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 193–209.

Yuniarti. (2013). Pendekatan Ekonomi dalam Politik Internasional. *Jurnal Interdependence*, 1(1), 46–54.